

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

<sup>1</sup>Togi Rezszy Purba, <sup>2</sup>Tika Flora Uli Simatupang, <sup>3</sup>Asri Putra Nardi Sitohang

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : [<sup>1</sup>togirezskypurba@gmail.com](mailto:togirezskypurba@gmail.com), [<sup>2</sup>tikasianturi75@gmail.com](mailto:tikasianturi75@gmail.com),  
[<sup>3</sup>asrisitohang1701@gmail.com](mailto:asrisitohang1701@gmail.com)

Corresponding Mail Author: [togirezskypurba@gmail.com](mailto:togirezskypurba@gmail.com)

---

***Abstract** : This study aims to determine the financial performance of the Regional Government of North Sumatra province. Evaluation or assessment of government performance can be seen from the government's financial statements. The government is responsible for distributing financial statements to the public. Government Accountability to a clean public is a demand that must be met by the government, where to realize it requires the trust of the community. One of the tools to facilitate the achievement of competitive local government financial statements is that the local government financial statements are used to compare accurate financial performance with the budget, take into account operational conditions and results, ensure the level of compliance with laws and regulations that are linked to financial problems and other provisions and help evaluate the level of efficiency and effectiveness. Performance measurement for the public interest can be used as an evaluation or assessment and restore performance by comparing the work scheme and its application. Not only that, it can also be used as a benchmark for improving the performance of local governments in the next period, this study uses data from the 2016-2020 period, the type of data used is secondary data. Data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) North Sumatra. The results of this study indicate that from the ratio of regional financial independence, the Government of North Sumatra province shows a delegative relationship pattern, meaning that the region is able to implement regional autonomy financially., The government of North Sumatra province has not been able to maximize effectively in the management of local revenue targets. In the last five years, the indirect budget allocation is still larger than the direct expenditure, from the growth ratio can be seen from the original revenue still shows negative results in 2018 and 2019.*

***Keywords** : Ratio, GDP, PAD, Regional Spending.*

---

## I. Pendahuluan

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard 2001).

Pengelolaan anggaran pemerintah di masa sekarang mengacu pada sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Menurut Departemen Keuangan (2009: 11-20), ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan Sumengge (2013: 75) mengatakan bahwa anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Menurut Halim (2007: 234-241), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.

Salah satu evaluasi atau penilaian atas kinerja pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam membagikan laporan keuangan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di mana untuk mewujudkannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, memperhitungkan keadaan serta hasil operasional, memastikan tingkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terpaut dengan permasalahan keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik bisa dijadikan evaluasi atau penilaian dan memulihkan kinerja dengan pembanding

skema kerja serta penerapannya. Tidak hanya itu pula bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

## II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

### Landasan Teori

#### Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembangunan di daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 4 dan 5 menyebutkan, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu

Devas, et al (1989: 56) mengemukakan, bahwa pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah dengan prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (*Accountability*). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah, dan masyarakat umum.
2. Memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
5. Pengendalian. Aparat pengelola keuangan pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai.

Mardiasmo (1999: 11) mengemukakan, bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang

utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Badrudin (2012:97) mengatakan bahwa APBD merupakan rencana kerja pemda yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan LainLain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya.

### **Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari tiga komponen dasar,yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Ketiga komponen dasar ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

### **Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (PAD), pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat (dana perimbangan) dan pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Adapun komponen PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun

Komponen Selanjutnya adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer :

1. Transfer pemerintah pusat-Dana Perimbangan, terdiri dari :

1. Dana bagi hasil pajak
2. Dana bagi hasil sumberdaya alam
3. Dana alokasi umum
4. Dana alokasi khusus

2. Transfer pemerintah pusat lainnya :

1. Dana otonomi khusus
2. Dana penyesuaian

3. Transfer pemerintah provinsi, terdiri dari :

1. Pendapatan bagi hasil pajak
2. Pendapatan bagi hasil lainnya

#### Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

#### Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

#### Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Yang dimaksud dari efisien adalah suatu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga rendah, efektif adalah mencapai pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah

diterapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dan bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

### Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio merupakan suatu angka yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan aktivitas dalam membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan (Kasmir, 2012). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

### Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam peyelenggaraan desentralisasi.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian

dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 1. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 –50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

### Efisiensi

Efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132) adalah hubungan antara output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian maka pada prinsipnya efisiensi adalah ukuran perbandingan antara jumlah biaya dengan jumlah output yang dihasilkan dari biaya tersebut, jika diformulasi dalam persamaan matematis menurut Anggriani (2010:174) adalah sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{\text{Jumlah output yang dihasilkan}}{\text{Input (biaya) yang dikeluarkan}}$$

Tabel 2. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efisien	X>100%
Efisien Berimbang	X = 100%
Efisien	X<100%

Sumber : Moh.Mahsun, 2006

### Efektifitas

Menurut Anggriani (2010:174) efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektifitas

adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada outcome atau hasil yang terjadi. Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dengan demikian maka pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan formula menurut Anggriani (2010:174) sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Jumlah Output yang dihasilkan}}{\text{Output yang Diharapkan}}$$

Selanjutnya dalam pengukuran efektivitas, kriteria menurut Abdul Halim (2001:43) adalah apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase efektivitasnya menunjukkan pemungutan PAD semakin tidak efektif.

**Tabel 3. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan**

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektif Berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

#### Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Menurut Mahmudi (2010) analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi output kegiatan

Secara sederhana rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \\ \text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}} \\ \text{Rasio Pertumbuhan Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_{n-1}} \end{aligned}$$

### Metodologi Penelitian

#### Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan terhadap kinerja keuangan daerah provinsi Sumatera Utara

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berupa data anggaran dan realisasi APBD serta pertumbuhan ekonomi K Provinsi Sumatera. Periode data yang diambil adalah selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2020.

#### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari data instansi-instansi yang terkait yaitu misalnya Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan cara menghitung derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, efisiensi, efektivitas, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung, rasio pertumbuhan.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2. Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah output yang dihasilkan}}{\text{Input (biaya) yang dikeluarkan}}$$

3. Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{\text{Jumlah Ouput yang dihasilkan}}{\text{Output yang Diharapkan}}$$

4. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} &= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \\ \text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} &= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \end{aligned}$$

5. Rasio pertumbuhan

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - 1} \\ \text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - 1} \\ \text{Rasio Pertumbuhan Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_n - 1} \end{aligned}$$

### III. Hasil Dan Pembahasan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Utara diupayakan ada kenaikan setiap tahun

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

**Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020**

**Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

**Tabel 4. Derajat Desentralisasi**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Derajat Desentralisasi (%)
2016	4243259700	8486519401	49.99999999
2017	5420209346	10840418691	50
2018	5160752589	10321505177	50
2019	5558200383	11116400767	50
2020	5281007532	10562015063	50
		Rata Rata	50

Rasio derajat desentralisasi Provinsi Sumatera Utara relatif mengalami stagnan dari tahun ke tahun. Bila dilakukan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir, maka angka rasio ini mencapai 50%. Ini menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Berikut ini hasil analisis rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020.

**Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2016	99.99999998	Delegatif
2017	100	Delegatif
2018	100	Delegatif
2019	99.99999998	Delegatif
2020	100	Delegatif

Berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah diatas bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2016–2020 cukup mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2020, rasio kemandirian

keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunjukkan pola hubungan yang delegatif.

### Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dari perhitungan rasio EKD, dalam lima tahun terakhir diperoleh nilai rata-rata rasio EKD sebesar 86.92 artinya target PAD yang ditetapkan belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dan Rasio Efisiensi menunjukkan sudah efisien. Berikut rasio efektivitas dan efisiensi dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 6. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah**

Tahun	Target Penerimaan	PAD	Rasio Efektivitas	Pola Hubungan
2016	4630468148	4243259700	0.916378121	Tidak Efektif
2017	4925627726	5420209346	1.100409866	Efektif
2018	5732425486	5160752589	0.90027382	Tidak Efektif
2019	7583849755	5558200383	0.732899591	Tidak Efektif
2020	7583849755	5281007532	0.696349177	Tidak Efektif
			86.92621148	Tidak Efektif
Tahun	Belanja Daerah	PAD	Rasio Efisiensi	Pola Hubungan
2016	976423915	4243259700	23.01117499	Efisien
2017	12518868105	5420209346	230.9665053	Efisien
2018	12563387550	5160752589	243.4409969	Efisien
2019	13440323706	5558200383	241.8107081	Efisien
2020	12653607434	5281007532	239.6059342	Efisien
			195.7670639	Efisien

### Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung atau belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Menurut Mahmudi (2010) semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.

**Tabel 7. Rasio Aktivitas**

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Daerah	Rasio BL	Rasio BTL
2016	2439220960	7037202955	976423915	249.8116773	720.7118596
2017	4344425209	8174442896	12518868105	34.70301926	65.29698074
2018	3782872671	8780514879	12563387550	30.11029196	69.88970804
2019	3726840016	9713483690	13440323706	27.72879655	72.27120345
2020	3461062021	9192545413	12653607434	27.35237393	72.64762607

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar dibandingkan rasio belanja langsung terhadap total belanja.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak langsung.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Secara tren, terlihat bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan meski pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan. Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu sebesar 27.73% dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2018 sebesar -4.78% dan tahun 2020 sebesar -4.98%.

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2017	27.7369223	27.73692227	78.10707928	16.16039708
2018	-4.786840147	-4.786840147	-12.92581897	7.414229822
2019	7.701353381	7.701353401	-1.481219694	10.62544536
2020	-4.987097116	-4.987097134	-7.131457048	-5.36304269

Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 7.70% sementara itu terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2020 sebesar -4.98%.

## IV. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola hubungan yang delegatif artinya daerah mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat memaksimalkan secara efektif dalam pengelolaan target Pendapatan Asli Daerah.
3. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran belanja tidak langsung masih lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung.
4. Dari rasio pertumbuhan bisa dilihat dari Pendapatan Asli Daerah masih menunjukkan hasil negative pada tahun 2018 dan 2019.

### Saran

1. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh instansi terkait sebagai manajer publik di tingkat provinsi adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah di tingkat provinsi diarahkan

pada program prioritas, diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomni masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya di provinsi bersangkutan

2. Agar belanja daerah Provinsi Sumatera Utara bisa lebih efisien, maka pemerintah daerah di setiap unit kerja perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.

#### V. Daftar Pustaka

- Anggriani (2010), Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD Secara Komprehensif, Edisi I, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.
- Budianto, A. (n.d.). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. Departemen Keuangan RI. 2009. Buku 2: Pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK). Jakarta.([http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku\\_2.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_2.pdf) , diakses 8 September 2015)
- Halim, Abdul (2007), Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua. Yogyakarta, UPPSTIM YKPN
- Halim, Abdul (2001), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sitompul, T. R. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan Kabupaten Bengkayang.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Jurnal EMBAVol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81.
- Trianto, A. (n.d.). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. ISSN Cetak : 1978-6579 ISSN Online : 2477-2984.